



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ //4 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1774);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1775);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

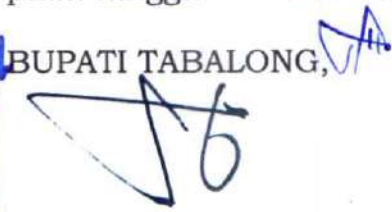
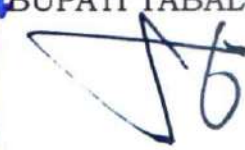
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memproses Dokumen kependudukan serta melaksanakan tugas lainnya dari atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Tabalong.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 114 /2024
TANGGAL 8 Maret 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	NAMA	TUGAS
1.	Sari Wahidah	Operator SIAK Desa Hapalah
2.	Rahman Hakim	Operator SIAK Desa Bangkiling
3.	Jari Ahmad, S.Pd.I	Operator SIAK Desa Sungai Durian
4.	Aspihannor	Operator SIAK Desa Pematang
5.	Reydo Wahyudinnata	Operator SIAK Desa Hariang
6.	Saifullah	Operator SIAK Desa Banua Lawas
7.	Taberi	Operator SIAK Desa Habau
8.	Bijuri	Operator SIAK Desa Banua Rantau
9.	Junaidi	Operator SIAK Desa Purai
10.	Nabhan	Operator SIAK Desa Batang Banyu
11.	Syahrul Fadillah	Operator SIAK Desa Habau Hulu
12.	Mila Wati	Operator SIAK Desa Bungin
13.	M. Riyadi	Operator SIAK Desa Bangkiling Raya
14.	Burjani	Operator SIAK Desa Talan
15.	Rizka	Operator SIAK Desa Sungai Anyar
16.	Maya	Operator SIAK Kelurahan Pulau
17.	Sujida Nazmillah	Operator SIAK Desa Ampukung
18.	Muhammad Wahyudinoor Fitriadi	Operator SIAK Desa Telaga Itar
19.	Fathul Jannah	Operator SIAK Desa Sungai Buluh
20.	Hendra	Operator SIAK Desa Binturu
21.	Rifka Hastuti	Operator SIAK Desa Pudak Setegal
22.	Lydiana Rahmah	Operator SIAK Desa Pasar Panas
23.	Muhammad Misriadi, S.Pd	Operator SIAK Desa Masintan
24.	Siska Marliana	Operator SIAK Desa Takulat
25.	Malinda Malini	Operator SIAK Desa Paliat
26.	Arbainah	Operator SIAK Desa Karang Putih
27.	Zainal Hakim	Operator SIAK Desa Bahungin

NO.	NAMA	TUGAS
28.	Kiptiah	Operator SIAK Desa Padangin
29.	Anita Dewi	Operator SIAK Desa Tamiyang
30.	Jainor Sulaiman	Operator SIAK Desa Tanta Hulu
31.	Arbani	Operator SIAK Desa Murung Baru
32.	Hirdinansyah	Operator SIAK Desa Luk Bayur
33.	Aan Syafi'i	Operator SIAK Desa Walangkir
34.	Julianus	Operator SIAK Desa Warukin
35.	Noorliani	Operator SIAK Desa Barimbun
36.	Widiarti	Operator SIAK Desa Mangkusip
37.	Fahrayani, S.Sos.	Operator SIAK Desa Pamarangan Kanan
38.	Pajri	Operator SIAK Desa Pulau Ku,u
39.	Husni	Operator SIAK Desa Tanta
40.	Nurhani	Operator SIAK Desa Padang Panjang
41.	Mahdianor	Operator SIAK Desa Puain Kanan
42.	Mario Ramadhika Firdaus	Operator SIAK Kelurahan Jangkung
43.	Gazali Rahman	Operator SIAK Kelurahan Tanjung
44.	Mia Audina	Operator SIAK Kelurahan Agung
45.	Gono Suwarno	Operator SIAK Kelurahan Hikun
46.	Rustam	Operator SIAK Desa Banyu Tajun
47.	Muhammad Fahmi	Operator SIAK Desa Pamarangan kiwa
48.	Zainudin	Operator SIAK Desa Puain Kiwa
49.	Sukran, S. Kom	Operator SIAK Desa Juai
50.	Hepni Eryadi	Operator SIAK Desa Mahe Seberang
51.	Devie Herwinda, S.AP	Operator SIAK Desa Kambitin
52.	Lola Alfiana, S.AP	Operator SIAK Desa Wayau
53.	Abdul Rasyid	Operator SIAK Desa Garunggung
54.	Junaidi	Operator SIAK Desa Kitang
55.	Mawarni	Operator SIAK Desa Sungai Pimping
56.	Ahmad Humaidi	Operator SIAK Desa Kambitin Raya
57.	Rumiansyah	Operator SIAK Desa Marindi

NO.	NAMA	TUGAS
58.	Ahmad Husaini, S.Kom	Operator SIAK Desa Wirang
59.	Irwan Saputra	Operator SIAK Desa Bongkang
60.	Farida, S.AP	Operator SIAK Desa Nawin
61.	Muhamad Yamani	Operator SIAK Desa Halong
62.	Agus Setiawan	Operator SIAK Desa Hayup
63.	Ahmad Firdaus	Operator SIAK Desa Kembang Kuning
64.	Novi Alfiani Kasanah	Operator SIAK Desa Seradang
65.	Norjanah	Operator SIAK Desa Mahe Pasar
66.	Yuliana	Operator SIAK Desa Lok Batu
67.	Nor Maya Sari	Operator SIAK Desa Suput
68.	Jaliansyah	Operator SIAK Desa Suriyan
69.	Sagimin	Operator SIAK Desa Catur Karya
70.	Erni Hernita	Operator SIAK Kelurahan Belimbing Raya
71.	Dewi Kurina	Operator SIAK Kelurahan Belimbing
72.	Aisyah	Operator SIAK Kelurahan Sulingan
73.	Zainudin	Operator SIAK Kelurahan Mabuun
74.	Mahyudin	Operator SIAK Kelurahan Pembataan
75.	Ahmad Taufik	Operator SIAK Desa Maburai
76.	Hardifah Luthfi	Operator SIAK Desa Kasiau
77.	Novi Yulianti, S.AB	Operator SIAK Desa Kapar
78.	Mahmud Ahmad Badria	Operator SIAK Desa Masukau
79.	Faizal Ikhfan Annaass	Operator SIAK Desa Kasiau Raya
80.	Akhmad Jaini	Operator SIAK Desa Kupang Nunding
81.	Katwanto	Operator SIAK Desa Mangkupum
82.	Siti Hasanah	Operator SIAK Desa Pasar Batu
83.	Eko Widiyastianto	Operator SIAK Desa Uwie
84.	Misli Susanti	Operator SIAK Desa Muara Uya
85.	Herliani	Operator SIAK Desa Lumbang
86.	Andi Nasrullah	Operator SIAK Desa Santuun
87.	M. Didi Irawan	Operator SIAK Desa Simpung Layung

NO.	NAMA	TUGAS
88.	Irwan	Operator SIAK Desa Binjai
89.	Erni Hariati	Operator SIAK Desa Palapi
90.	Supia Aripanti	Operator SIAK Desa Kampung Baru
91.	Siti Alfiah	Operator SIAK Desa Salikung
92.	Muhajir	Operator SIAK Desa Ribang
93.	Sarikin	Operator SIAK Desa Sungai Kumap
94.	Rusdinsyah	Operator SIAK Desa Madang
95.	Elsa Hermayanti	Operator SIAK Desa Tantaringin
96.	Akhmad Riza Wahidi, S.Pd	Operator SIAK Desa Murung Karangan
97.	Najeri	Operator SIAK Desa Padangin
98.	Eka Iswin Rohmayanti, S.P.	Operator SIAK Desa Manduin
99.	Hariyanti	Operator SIAK Desa Mantuil
100.	Azwar Rijali	Operator SIAK Desa Harus
101.	Ilyas	Operator SIAK Desa Pugaan
102.	Budiya Rahman	Operator SIAK Desa Pampanan
103.	Liana Ernana, S.sos	Operator SIAK Desa Sungai Rukam II
104.	Muhammad Hairudin Mahfuz	Operator SIAK Desa Sungai Rukam I
105.	Daud Yahya S.sos	Operator SIAK Desa Jirak
106.	Fadillah	Operator SIAK Desa Halangan
107.	Markati	Operator SIAK Desa Tamunti
108.	Lisna Wati	Operator SIAK Desa Bilas
109.	Dadiansyah	Operator SIAK Desa Kaong
110.	Nela Gusnawati	Operator SIAK Desa Pangelak
111.	Novitalia Desiari	Operator SIAK Desa Kinarum
112.	Andis Sukma	Operator SIAK Desa Masingai II
113.	Achmad Abdul Shokheh, S.AB	Operator SIAK Desa Masingai I
114.	M. Didi Wardana	Operator SIAK Desa Teratau
115.	Adi Sastra Wahyuni	Operator SIAK Desa Namun
116.	Norianto	Operator SIAK Desa Jaro
117.	Ani Muslimah	Operator SIAK Desa Solan
118.	Fajri Rahman	Operator SIAK Desa Muang
119.	Bayu Syahdani	Operator SIAK Desa Lano

NO.	NAMA	TUGAS
120.	Syaipullah	Operator SIAK Desa Purui
121.	Norliana	Operator SIAK Desa Garagata
122.	Kariyana Putri Utama	Operator SIAK Desa Nalui
123.	Siti Hairiah	Operator SIAK Desa Waling
124.	Wanty Ayu Wulandari	Operator SIAK Desa Usih
125.	Mahyudin	Operator SIAK Desa Bintang Ara
126.	Rahmadi	Operator SIAK Desa Burum
127.	Mansyuri	Operator SIAK Desa Panaan
128.	Hermidin	Operator SIAK Desa Dambung Raya
129.	Siti Maisaroh	Operator SIAK Desa Argo Mulyo
130.	Solikin	Operator SIAK Desa Bumi Makmur
131.	Muhammad Rasyid	Operator SIAK Desa Hegar Manah

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI